



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan petugas pengelola website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum menggunakan berbagai macam metode sosialisasi dan pendidikan pemilih termasuk media sosial resmi;
 - c. bahwa untuk menunjang operasional kegiatan pengelolaan website dan media sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka perlu menunjuk Operator Pengelola Website dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
 - d. bahwa personil yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Pengelola Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penunjukan Operator Pengelola Website dan Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

KESATU : Menunjuk Operator Pengelola Website dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka:

Nama : Mahesa Bayu Ahmad Sabihu

NIPPPK : 200309182025211001

Jabatan : Staf pada Sub Bagian Partisipasi,
Hubungan Masyarakat dan Sumber
Daya Manusia

KEDUA : Tugas Operator Pengelola Website dan Media Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. mengelola seluruh situs website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
2. melakukan pemeliharaan dan updating data website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
3. merancang dan membuat konten tentang program, kebijakan dan layanan publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat;

4. memublikasikan konten yang edukatof, menarik dan relevan;
5. merespon pertanyaan dan komentar masyarakat secara professional untuk membangun hubungan positif dengan publik;
6. melakukan promosi program, agenda dan capaian lembaga untuk membentuk citra positif dan meningkatkan kepercayaan publik;
7. memastikan keamanan akun dan memastikan semua konten mematuhi regulasi serta kebijakan lembaga;
8. melaporkan hasil pengelolaan website dan media sosial kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

KETIGA : Dengan diterbitkan Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 9/HK.03.2-Kpt/5307/Sek-Kab/I/2021 tentang Penunjukan Operator Pengelola Website Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere

pada tanggal 7 November 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

SEMUEL DESRYANTO SING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat,



Simon Doni Tukan